

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Strategi pembangunan merah¹ menuai kritik tajam dari dunia Barat, terutama karena tidak sesuai dengan panduan prinsip pembangunan berkelanjutan.² Konsep pembangunan berkelanjutan yang didefinisikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (1987) adalah bahwa secara keseluruhan, pembangunan mulai dari prinsip, kebijakan, dan praktek di dalam sektor publik maupun privat harus mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa menimbulkan resiko bagi kebutuhan generasi di masa mendatang.³ Berdasarkan hal tersebut negara yang melakukan pembangunan harus memperhatikan keseimbangan dalam pencapaian sosial, kelestarian lingkungan, sekaligus pertumbuhan ekonomi.⁴ Strategi pembangunan hijau mencakup empat aspek. Pertama, *smart growth*, yaitu apa yang disebut dengan manajemen pertumbuhan adalah bagaimana pembangunan fasilitas publik dapat dijalankan dengan efektif.⁵ Kedua, *new urbanism* yang berfokus pada bagaimana mengalaborasikan dan menciptakan kehidupan urban yang berdampingan dengan kehidupan rural.⁶

¹ Lihat W.M. Adams, "Countercurrent in Sustainable Development," *Green Development*, 3rd edition (London & New York: Routledge, 2009): 171-201.

² Dalam Adams 2009, *Green Development*, 179 dikemukakan bahwa strategi pembangunan merah merupakan *mainstream sustainable development* yang tidak memperhatikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan secara seimbang seperti yang tertuang di dalam Johannesburg Plan of Implementation; pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pelestarian lingkungan. *Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development*, (accessed May 3, 2015); available from http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/WSSD_PlanImpl.pdf.

³ World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*, 1987, (accessed April 18, 2015); available from Oxford: Oxford University Press, 1987), 41.

⁴ Robert H. Freilich and Neil M. Popowitz, "The Umbrella of Sustainability: Smart Growth, New Urbanism, Renewable Energy and Green Development in the 21st Century," *The Urban Lawyer* 42, no. 1 (2010): 4.

⁵ Freilich and Popowitz, "The Umbrella of Sustainability," 4.

⁶ Freilich and Popowitz, "The Umbrella of Sustainability," 4.

Ketiga, *renewable energy*, yaitu pemanfaatan sumber energi terbaru dan ramah lingkungan seperti tenaga surya, angin, panas bumi, nuklir, *hydroelectric*, dan *bio-fuels*.⁷ Keempat, *green development* yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang ramah lingkungan dan sesuai dengan kondisi sekitar mencakup konstruksi, desain, material bangunan, dan juga lingkungan di sekitarnya.⁸

Tiongkok menerjemahkan pembangunan berkelanjutan ke dalam rancangan strategi merah yang memiliki perbedaan signifikan dan dampak yang berbeda pula pada ketiga pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan struktur masyarakat sosialis, Tiongkok mengandalkan metode revolusi yang berasal dari bawah untuk mencapai perubahan sosial.⁹ Oleh karena itu, perubahan sosial menjadi lebih penting daripada personal.¹⁰ Namun, konsep kepemimpinan yang digunakan didasarkan pada intelegensi individu.¹¹

⁷ Freilich and Popowitz, "The Umbrella of Sustainability," 4.

⁸ Freilich and Popowitz, "The Umbrella of Sustainability," 4.

⁹ Adams, *Green Development*, 179.

¹⁰ Adams, *Green Development*, 179.

¹¹ Adams, *Green Development*, 179.

Tabel I.1 Komparasi Strategi Pembangunan Hijau dan Merah¹²*Table 6.5 Comparison of Red and Green strategies of development*

	<i>Red strategy</i>	<i>Green strategy</i>
Oppressive system	The capitalist economy	The technological culture
Enemy	Capitalists	Technocracy
Social vision	Socialist society	Communal society
Method	Macro-revolution, socialism from above by working-class revolution	Micro-revolution, small groups withdraw from system to defend autonomous ways of life
Spatial frame	No socialist islands in a capitalist sea	Local experiments, liberated zones
At stake	Material interests, collective identity, ownership	Existential needs, personal identity, autonomy
The new person	Social transformation before personal	Simultaneous personal and social transformation
Leadership	Intelligentsia	Post-materialistic elite
Social base	Working class	Marginalised people
Institutional base	Big industrial sites	Small neighbourhood communities
Organization	Centralised, formal	Decentralised, informal
Ideology	Abstract, rational	Concrete, intuitive, open

Source: Friberg and Hettne (1985)

Sebagai salah satu negara industri terbesar di dunia, Tiongkok merupakan negara dengan penghasil dan pemakai sumber energi batu bara yang masif.¹³ Dalam mendukung kebutuhan ekonomi dan perkembangan industri, 70 persen pasokan energi listrik dihasilkan dari batu bara.¹⁴ Di sisi lain, batu bara menjadi sumber emisi karbon terbesar yang sejak tahun 1990 sebanyak dua per tiga emisi karbon di dunia disumbang oleh Tiongkok.¹⁵ Sun Yat-Sen sejak tahun 1919 melalui artikelnya “A Plan to Develop Industry” mengutarakan kemungkinan untuk membangun bendungan di Sungai Yangtze untuk pemenuhan kebutuhan

¹² Adams, *Green Development*, 179.

¹³ Siru Zhu, *Three Gorges Dam: Reflections and Controversy* (accessed June 8, 2015); available from <http://prospectjournal.org/2014/05/23/three-gorges-dam-reflections-and-controversy/>.

¹⁴ Zhu, *Three Gorges Dam*.

¹⁵ PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, *Global CO2 emissions: increase continued in 2007 - PBL Netherlands Environmental Assessment Agency* (accessed June 8, 2015); available from <http://www.pbl.nl/en/publications/2008/GlobalCO2emissionsthrough2007>.

energi listrik dan pengontrol banjir.¹⁶ Diperkirakan 10 persen dari total suplai energi listrik Tiongkok akan disumbang oleh pembangkit listrik tenaga air atau *hydropower* dari TGD.¹⁷ Bencana banjir di Sungai Yangtze yang terbesar terjadi pada tahun 1911, 1931, 1935, dan 1954 yang menewaskan 300 ribu orang.¹⁸ Selama 200 tahun terhitung mundur dari tahun 1954 bencana banjir juga telah memaksa satu juta orang untuk pindah dari tempat tinggalnya dan banjir pada tahun 1981 menewaskan sekitar tiga ribu jiwa.¹⁹ Proyek TGD pun menemui justifikasi yang kuat untuk direalisasikan oleh pemerintah Tiongkok.²⁰

Keberlangsungan ekonomi dan pembaruan lingkungan atau sumber daya alam menjadi bahasan yang banyak tercetuskan dari proyek TGD. Namun, yang patut menjadi perhatian adalah bahwa proyek TGD justru menimbulkan ancaman terhadap pilar-pilar pembangunan berkelanjutan. Strategi pembangunan merah dengan konsep kepemimpinan yang digunakan didasarkan pada intelegensi individu tertuang pada mandat para pemimpin Tiongkok sejak tercetusnya gagasan Sun Yat-Sen pada tahun 1919 untuk membangun bendungan di Sungai Yangtze membuat proyek TGD akan tetap dijalankan bagaimana pun konsekuensinya.²¹ Dari aspek ekologis, TGD secara signifikan menimbulkan ancaman terhadap ekosistem dan habitat sekitar 300 spesies ikan Sungai Yangtze, penurunan kualitas air, bertambah besarnya kemungkinan gempa bumi dan banjir

¹⁶ Dai 1994 dalam Marta Ponseti and Jordi López-Pujol, "The Three Gorges Dam Project in China: history and consequences," *Orientalis*, (2006): 153.

¹⁷ National Geographic News, *China's Three Gorges Dam, by the Numbers* (accessed June 20, 2015); available from http://news.nationalgeographic.com/news/2006/06/060609-gorges-dam_2.html.

¹⁸ Jackson and Sleigh 2000 dalam Desire Tullos, "Assesing the influence of environmental impact assessments on science and policy: An analysis of the Three Gorges Project," *Journal of Environmental Management* xxx, (2008): 2.

¹⁹ Tullos, "Assesing the influence of environmental impact assessments on science and policy," 2.

²⁰ Hal tersebut semakin dikuatkan ketika pada tahun 1998 banjir besar kembali terjadi di Sungai Yangtze masih terus terjadi selama proses pembangunan TGD, yakni pada tahun 1998 yang memakan 4000 korban jiwa dan menenggelamkan 25 juta hektar lahan pertanian serta estimasi kerugian mencapai 36 miliar dolar Amerika Serikat. Lihat Tullos, "Assesing the influence of environmental impact assessments on science and policy," 2-3.

²¹ Lihat Ponseti and López-Pujol, "The Three Gorges Dam Project in China," 151-188.

lumpur di sekitar bendungan,²² dan penurunan produksi ikan.²³ Level epidemi malaria di kawasan Sungai Yangtze diprediksi meningkat karena kenaikan volume air.²⁴ Dari sisi perkembangan dan keberlangsungan kehidupan sosial sekitar 1,7-2 juta penduduk yang hidup di sekitar Sungai Yangtze harus direlokasi²⁵ bahkan kemungkinan dapat mencapai 6 juta orang yang harus dipindahkan.²⁶ Dalam kajian para akademisi, risiko jangka panjang pembangunan TGD adalah kemiskinan yang semakin memburuk dari penduduk yang direlokasi, kerawanan pangan, kekurangan lapangan pekerjaan, dan marginalisasi sosial.²⁷ Kondisi penduduk rural di aliran Sungai Yangtze yang miskin dapat diperburuk dengan adanya relokasi tetapi pemerintah Tiongkok tidak pernah mengadakan diskusi atau pengkajian kebijakan terhadap kondisi tersebut.²⁸ Strategi pembangunan merah yang terimplikasi pada proyek TGD berakibat pada industrialisasi yang tidak memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang.

²² *Three Gorges Dam Project: Environmental Impacts*, (accessed December 19, 2014); available from <https://www.mtholyoke.edu/~lpohara/Pol%20116/enviro.html>. Secara terperinci spesies yang benar-benar terancam adalah lumba-lumba Sungai Cina, Chinese Sturgeon, harimau Cina, Chinese Alligator, Siberian Crane, dan Giant Panda. Ada sekitar 47 spesies yang terancam dan mendekati kepunahan yang dilindungi oleh hukum nasional Tiongkok di Sungai Yangtze. Jumlah lumba-lumba yang hidup di Sungai Yangtze kurang dari 100 ekor. Konstruksi bendungan dapat berakibat pada penurunan suhu dan berkurangnya kadar oksigen di dalam air sehingga mengganggu aktivitas akuatik Sungai Yangtze untuk bertahan hidup.

²³ Peter H. Gleick, "Three Gorges Dam Project, Yangtze River, China," *The World Water*, (2008-2009): 142-3.

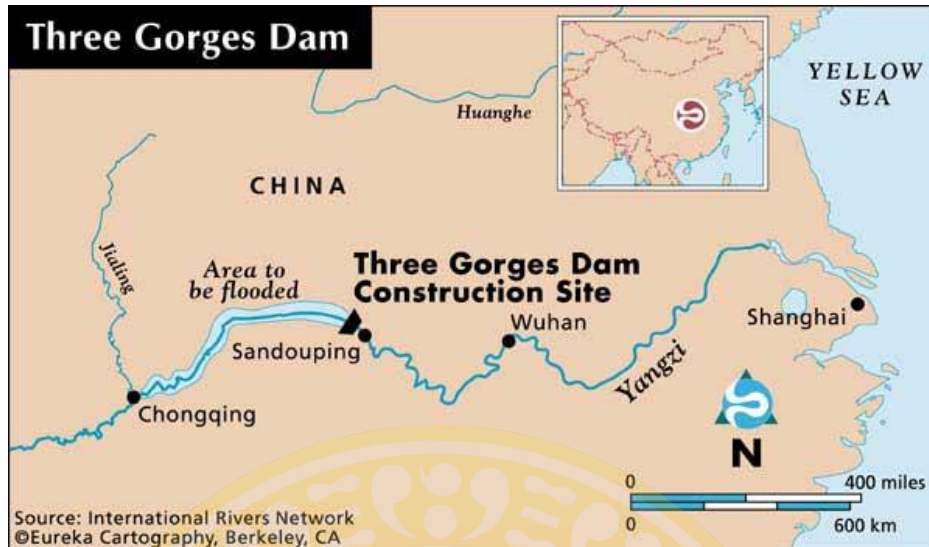
²⁴ A. Gupta dan M. Asher, *Environment and the Developing World Principles, Policies, and Management* (New York: John Wiley and Sons, 2000).

²⁵ Samuel Robert Fishleigh Allin, *An Examination of China's Three Gorges Dam Project Based on the Framework*, (Blacksburg: 2004): 28.

²⁶ Gleick, "Three Gorges Dam Project, Yangtze River, China," 145.

²⁷ WCD 2000; Li et al. 2001; Heggelund 2004, 2006 dalam Gleick, "Three Gorges Dam Project, Yangtze River, China," 146.

²⁸ Gleick, "Three Gorges Dam Project, Yangtze River, China," 146.

Gambar I.1 Letak Konstruksi TGD²⁹

Jauh sebelum TGD mulai dibangun, pada tahun 1956 Ministry of Power, Li Rui menolak rancangan TGD setinggi 250 meter.³⁰ Di tahun yang sama muncul Hundred Flower Movement yang merupakan kampanye kecil para intelektual untuk mendiskusikan berbagai masalah yang dihadapi oleh Tiongkok.³¹ Namun, Hundred Flower Movement dihentikan oleh Mao pada tahun 1957 karena banyak mengkritik pemerintah. Hal tersebut memicu bentuk kampanye dan protes lain di tahun yang sama, yakni penentangan proyek TGD oleh para tenaga ahli atau teknisi bendungan karena desain TGD dinilai lemah secara teknis.³² Pada tahun 1986, Chinese People's Political Consultative Conference mengeluarkan laporan penolakan terhadap rencana konstruksi TGD dan meningkatkan perhatian pada upaya penanggulangan sedimentasi dan pengontrolan banjir karena efek dari pembangunan bendungan.³³ Peristiwa Tianamen pun sempat diwarnai dengan isu

²⁹ *The Three Gorges Dam Project*, (accessed June 17, 2015); available from <https://www.mtholyoke.edu/~lpohara/>. Skala peta tidak berlaku.

³⁰ Dai 1994 dalam Ponseti and López-Pujol, "The Three Gorges Dam Project in China," 153.

³¹ Ponseti and López-Pujol, "The Three Gorges Dam Project in China," 153-4.

³² Dai 1994; Shapiro 2001 dalam Ponseti and López-Pujol, "The Three Gorges Dam Project in China," 154.

³³ D. Chetham, *Before the Deluge: The Vanishing World of the Yangtze's Three Gorges* (United States of America: Palgrave Macmillan, 2002).

penolakan proyek TGD.³⁴ Pengawas antikorupsi Partai Komunis menemukan bahwa para pejabat di Three Gorges Corporation sebagai lembaga yang bertugas sebagai pelaksana proyek, yang berdiri pada tahun 1993, terbukti bersalah melakukan nepotisme dan penyuaian properti sebesar 26 miliar.³⁵ Namun, berbagai macam penentangan yang dilakukan pihak-pihak antidam tersebut belum membuahkan hasil positif. Setelah tahun 2000, dalam melakukan pembangunan TGD, Tiongkok justru memperlihatkan sikap yang berbeda dengan melakukan kompromi terhadap hasil laporan WCD tahun 2000 untuk menerapkan standar pembangunan bendungan di seluruh dunia. Pemerintah Tiongkok menyetujui beberapa poin di dalam laporan tersebut, yang antara lain: meningkatkan penghitungan risiko ekonomi, menggalakkan penelitian terhadap ekosistem yang terdampak, meningkatkan perhatian pada permasalahan sosial yang mendasar akibat relokasi, dan komitmen untuk patuh terhadap rencana yang disusun.³⁶ Prosedur relokasi yang sama seperti anjuran Bank Dunia pada awal tahun 1990-an pun dijalankan.³⁷

Berbagai pertentangan dan kemunculan gerakan antidam maupun pro-dam menunjukkan bahwa kasus proyek TGD mengangkat aktor domestik sekaligus internasional yang variatif dalam memengaruhi proses pembuatan kebijakan, kepentingan, dan interaksi kompleks di antara segenap pihak yang terlibat

Margaret Barber and Gráinne Rider, ed., *Damming the Three Gorges: What Dam-Builders Don't Want You To Know* (accessed April 28, 2015); available from <http://journal.probeinternational.org/2008/07/10/introduction-1/>. Peristiwa Tianamen Square pada tahun 1989 juga membawa isu Three Gorges Dam. Lihat Ashton Hoff, "The Three Gorges Dam: Opportunities, Challenges, and Effects on Chinese Politics", 3. <https://scholar.vt.edu/access/content/user/hoffae/Portfolio/INTASC%201/3%20Gorges%20Dam.pdf>

³⁵ Zhu, *Three Gorges Dam: Reflections and Controversy*.

³⁶ Lihat Allin, *An Examination of China's Three Gorges Dam*, 35.

³⁷ Allin, *An Examination of China's Three Gorges Dam*, 30.

tersebut.³⁸ WCD merupakan sebuah forum yang menghadirkan aktor-aktor politik lingkungan internasional yang bervariasi, mulai dari korporasi, NGOs, agen pemerintah, dan juga asosiasi internasional.³⁹ Oleh karena itu, penjelasan *state-centric* tidak memberi gambaran yang cukup mengenai bagaimana aktor nonnegara berpartisipasi dan berpengaruh di Tiongkok dalam pembuatan kebijakan mengenai perkembangan isu kontemporer seperti isu *hydropower*.⁴⁰ Perubahan posisi Tiongkok dalam pembangunan TGD menjadi suatu titik krusial bagaimana aktor nonnegara mengambil peran dalam konstelasi politik lingkungan internasional.

Era post-Mao dicirikan dengan pembuatan kebijakan *hydropower* yang lebih terinstitusionalisasi oleh agen-agen di dalam negara.⁴¹ Sementara itu, pandangan ini diperluas dengan menjelaskan bagaimana fragmentasi di dalam pemerintahan Tiongkok menciptakan aktor-aktor yang variatif dalam memengaruhi proses pembuatan kebijakan di dalam negara yang otoriter.⁴² Sejauh ini, telah dilakukan penelitian mengenai bagaimana para aktivis dan organisasi seperti ENGOs dan jurnalis menjalani peran dominan dalam menentang luas lahan pembangunan TGD dengan merujuk pada alternatif-alternatif kebijakan yang didasarkan pada reservasi lingkungan dan kultural.⁴³ Aktor-aktor nonnegara tersebut tidak hanya bergerak secara independen tetapi turut memperbesar pengaruh melalui pendekatan dan mencari dukungan lewat *like-minded officials*.⁴⁴ Namun, belum dibahas bagaimana konstelasi politik lingkungan internasional

³⁸ Fengshi Wu, *Double-Mobilization: Transnational Advocacy Networks for China's Environment and Public Health* (Dissertation, University of Maryland, 2005), 316.

³⁹ Lihat Lampiran 1.

⁴⁰ Wu, *Double-Mobilization: Transnational Advocacy Networks*, 316.

⁴¹ Wu, *Double-Mobilization: Transnational Advocacy Networks*, 317.

⁴² Wu, *Double-Mobilization: Transnational Advocacy Networks*, 318.

⁴³ Wu, *Double-Mobilization: Transnational Advocacy Networks*, 318.

⁴⁴ Wu, *Double-Mobilization: Transnational Advocacy Networks*, 318.

secara kompleks dapat menjelaskan bagaimana aktor-aktor nonnegara yang memiliki jaringan dan tergabung ke dalam WCD dapat memengaruhi perubahan posisi Tiongkok terhadap pembangunan TGD. Berlangsungnya proyek TGD sebagai salah satu bentuk pembangunan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta sosial dan upaya pemerintah Tiongkok untuk mengadopsi strategi pembangunan hijau yang berupaya mengkaji ulang pembangunan Three Gorges Dam dengan mengambil poin-poin dalam laporan WCD menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan, rumusan masalah yang diajukan adalah: Bagaimana strategi masyarakat sipil global dalam memengaruhi Tiongkok di pembangunan Three Gorges Dam tahun 2000?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah memberikan eksplanasi mengenai Tiongkok yang melakukan perubahan posisi pada proses pembangunan TGD yang dipengaruhi oleh interaksi yang terjadi di antara gerakan antidam dan pro-dam yang memengaruhi perubahan posisi Tiongkok dari modernisasi ekologis lemah menjadi modernisasi ekologis kuat.

I.4 Kerangka Pemikiran

I.4.1 Ekososialisme dan Pembangunan Berkelanjutan

Ekososialisme merupakan turunan dari *green thought*, yakni pemikiran tentang sistem negara, struktur perekonomian global, institusi global, dan teknologi modern yang dimanfaatkan secara masif dalam penyelesaian masalah lingkungan hidup tetapi tidak tepat sasaran serta mengakibatkan degradasi lingkungan.⁴⁵ *Green thought* beranggapan bahwa dunia merupakan sebuah sistem yang saling terkait sehingga pemisahan antara manusia maupun makhluk hidup lainnya dengan lingkungan tidak relevan.⁴⁶ *Green thought* menolak strategi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi hingga melompat jauh di atas kualitas kehidupan.⁴⁷ Aktivitas sosial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia, lingkungan, dan spesies makhluk hidup lainnya.⁴⁸ Sementara itu, setiap makhluk hidup memiliki kedudukan yang sama di alam semesta sehingga memiliki hak yang sama untuk dapat menikmati dan memanfaatkan lingkungan tanpa gangguan dari satu sama lain.⁴⁹ Pandangan nonantroposentrisme diterapkan, yakni sebagai bagian yang menyatu dengan alam, manusia tidak seharusnya dipandang sebagai pusat kehidupan.⁵⁰

⁴⁵ Faisyal Rani, "Perspektif Green Thought Dalam Paradigma Baru Politik Internasional (Teori Dan Praktek)," Jurnal Transnasional 4, no. 2 (2013): 874.

⁴⁶ Rani, "Perspektif Green Thought Dalam Paradigma Baru Politik Internasional," 873.

⁴⁷ Rani, "Perspektif Green Thought Dalam Paradigma Baru Politik Internasional," 873. Pertumbuhan ekonomi yang terlampau tinggi dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah karena orientasi utamanya adalah *economic growth* dan *profit*.

⁴⁸ Rani, "Perspektif Green Thought Dalam Paradigma Baru Politik Internasional," 873.

⁴⁹ Rani, "Perspektif Green Thought Dalam Paradigma Baru Politik Internasional," 876.

⁵⁰ Rani, "Perspektif Green Thought Dalam Paradigma Baru Politik Internasional," 876.

Manusia melakukan aktivitas ekonomi dan sosial untuk mengembangkan dirinya serta memiliki kemampuan bertahan hidup dalam keberagaman.⁵¹ Namun, pembangunan⁵² dan industrialisasi memicu konflik dengan eksistensi lingkungan karena manusia tidak mendasarinya dengan penghargaan terhadap keanekaragaman hidup.⁵³ Di dalam Dunia Ketiga, kelestarian lingkungan masih menjadi permasalahan mendasar yang harus dipecahkan.⁵⁴ Di sisi lain, rencana pembangunan berkelanjutan di negara maju justru menarik diri dari keterikatan pembangunan terhadap lingkungan.⁵⁵

Degradasi lingkungan akibat penyelewengan dalam pembangunan⁵⁶ dan korupsi merupakan akibat dari tindakan pemerintah untuk melanjutkan pembangunan tanpa adanya pengawasan dari bawah atau tidak adanya institusi sosial maupun masyarakat yang mampu mengontrol pembangunan.⁵⁷ Oleh karena itu, modernisasi yang salah satunya dicirikan melalui pembangunan memiliki kecenderungan otoritarianisme dan dominasi sehingga harus diimbangi oleh kontrol yang kuat dari masyarakat sebagai bentuk peradaban.⁵⁸ Tanpa adanya pengaruh dan kemampuan kontrol dari masyarakat, pembangunan cenderung berjalan secara timpang. Ketimpangan dan dominasi oleh sebagian kelompok terhadap kepentingan-kepentingan lain banyak terjadi pada pembangunan di negara berkembang yang didasarkan pada kepentingan penguasa dengan tujuan untuk melakukan pembangunan ekonomi dan mengintimidasi kepentingan

⁵¹ Rani, "Perspektif Green Thought Dalam Paradigma Baru Politik Internasional," 876.

⁵² Rani, "Perspektif Green Thought Dalam Paradigma Baru Politik Internasional," 878.

⁵³ Rani, "Perspektif Green Thought Dalam Paradigma Baru Politik Internasional," 876.

⁵⁴ Adams, *Green Development Second Edition* (London & New York: Routledge, 2001), 155.

⁵⁵ Adams, *Green Development Second Edition*, 155.

⁵⁶ Rani, "Perspektif Green Thought Dalam Paradigma Baru Politik Internasional," 878.

⁵⁷ Adams, *Green Development Second Edition*, 155.

⁵⁸ Rani, "Perspektif Green Thought Dalam Paradigma Baru Politik Internasional," 878.

masyarakat sipil.⁵⁹ *Environmental justice and global justice movement* kemudian muncul karena adanya koneksi antara dominasi sosial dengan faktor atau pemahaman mengenai degradasi lingkungan.⁶⁰ Kelompok yang didominasi oleh penguasa merupakan kelompok yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan sehingga menanggung akibat dari degradasi lingkungan atau bahkan dipaksa terlibat dalam aktivitas tersebut.⁶¹

Ekososialisme merespon kondisi dunia dengan melakukan kritik terhadap pembangunan yang mengakibatkan degradasi lingkungan. Ekososialisme berasumsi bahwa sosialisme seharusnya menjadi solusi atas krisis lingkungan dan pembangunan.⁶² Asumsi ekososialisme adalah bahwa penjelasan mengenai degradasi lingkungan dapat diperoleh melalui keterkaitan hubungan antara ekonomi dan sosial, bukan melalui manusia dan alam.⁶³ Kapitalisme mengubah hubungan antara manusia dan tanah (*land*) sebagai alienasi ekonomi dengan alam dan kesadaran diri terhadap lingkungan yang menjadi sandaran manusia.⁶⁴ Dalam sistem kapitalis, manusia mengesampingkan kekuatan buruh dan hanya mengaitkan diri terhadap alam sebagai objek untuk dibeli dan dijual.⁶⁵ Alam diposisikan sebagai produk yang dikelola oleh negara ataupun perusahaan yang dibayar untuk proses konsumsi.⁶⁶

⁵⁹ Rani, "Perspektif Green Thought Dalam Paradigma Baru Politik Internasional," 878.

⁶⁰ John Barry, "Left-Wing Reactions to the Environment and Environmental Politics," *Environment and Social Theory Second Edition* (London & New York: Routledge, 2007), 178.

⁶¹ Barry, *Environment and Social Theory Second Edition*, 178.

⁶² Adams, *Green Development Second Edition*, 154.

⁶³ Barry, *Environment and Social Theory Second Edition*, 178.

⁶⁴ Adams, *Green Development Second Edition*, 157.

⁶⁵ Adams, *Green Development Second Edition*, 157.

⁶⁶ Adams, *Green Development Second Edition*, 157.

1.4.2 Jaringan Advokasi Transnasional

Politik internasional pada akhir abad ke-20 melibatkan aktor-aktor yang bervariasi hingga kemunculan aktor nonnegara. Interaksi antaraktor di dalam politik internasional menghasilkan jaringan yang dapat memengaruhi kebijakan-kebijakan politik. Keck dan Sikkink menyebut formasi jaringan tersebut sebagai jaringan advokasi transnasional.⁶⁷ Jaringan advokasi transnasional melibatkan keberadaan NGOs domestik maupun internasional, organisasi advokasi, gerakan sosial lokal, yayasan, media, perusahaan, asosiasi konsumen, IGOs regional maupun internasional, dan agen pemerintah yang memiliki karakter sukarela, resiprokal, dan sifat hubungan yang horizontal.⁶⁸ Aktor-aktor tersebut mengambil peran strategis dengan mengagendakan isu untuk membuat isu tersebut dibahas secara komprehensif, mendapatkan perhatian dan mendorong aksi, dan mendapatkan keuntungan melalui kelembagaan institusional yang sesuai.⁶⁹ Tidak semua aktor dapat muncul dalam setiap jenis jaringan advokasi transnasional.⁷⁰ Para ahli sepakat bahwa peran politik aktor nonnegara dapat terjadi di dalam lingkup domestik maupun internasional.⁷¹

Jaringan advokasi transnasional bekerja dalam situasi hubungan antara kelompok aktor nonnegara domestik dan pemerintah terputus sehingga tidak efektif untuk mencari solusi atas konflik yang terjadi.⁷² Para aktivis kemudian beranggapan bahwa jaringan dengan aktor di luar negaranya akan dapat

⁶⁷ Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink, "Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics," in *Activist Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*, (Ithaca: Cornell University Press, 1998), 89.

⁶⁸ Keck and Sikkink, *Activists Beyond Borders*, 91-2.

⁶⁹ Keck and Sikkink, *Activists Beyond Borders*, 90.

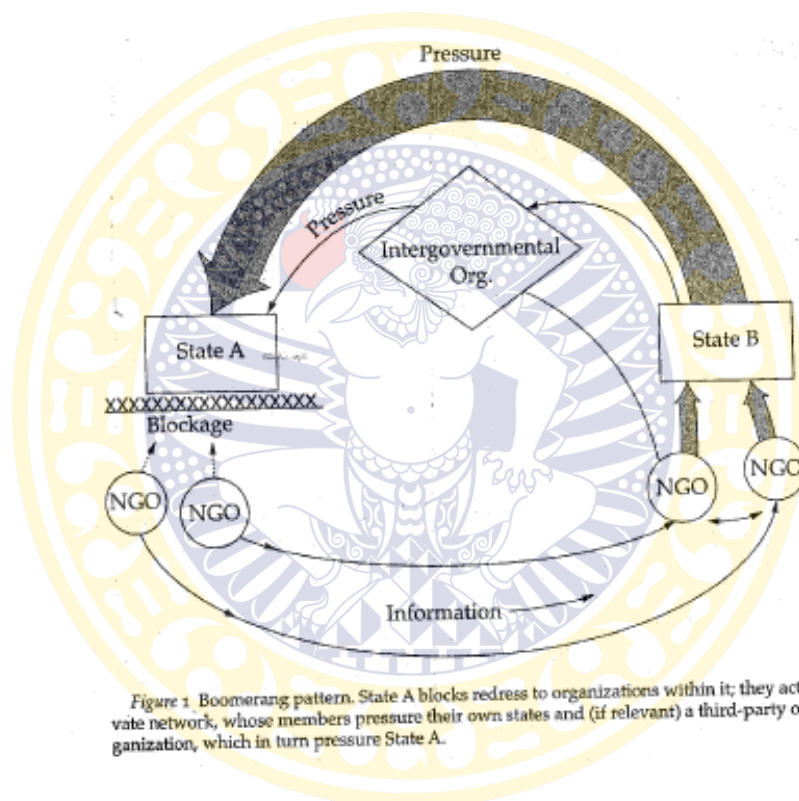
⁷⁰ Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink, "Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics," in *Activist Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*, (Ithaca: Cornell University Press, 1998), 9.

⁷¹ Keck and Sikkink, *Activists Beyond Borders*, 92.

⁷² Keck and Sikkink, *Activists Beyond Borders*, 93.

membantunya dalam mempromosikan isu yang ingin mereka gaungkan kepada pemerintah, misalnya melalui kampanye.⁷³ Keck dan Sikkink menawarkan model yang disebut *boomerang pattern* dalam menggambarkan jaringan ini. Selain itu, konferensi internasional dan bentuk-bentuk lain dari kontak yang dijalin dengan jaringan global dapat menciptakan ruang untuk membentuk dan memperkuat jaringan.⁷⁴

Bagan I.1 *Boomerang Pattern*⁷⁵



Jaringan advokasi transnasional memanfaatkan jaringan yang terbentuk untuk menjalankan fungsi politik informasi, politik simbolik, *leverage politics*, dan akuntabilitas politik.⁷⁶ Politik informasi merupakan kemampuan aktor untuk memobilisasi informasi ke aktor lain di luar negara target. Selain itu, baik aktor domestik maupun internasional dapat menggunakan even-even tertentu sebagai

⁷³ Keck and Sikkink, *Activists Beyond Borders*, 93.

⁷⁴ Keck and Sikkink, *Activists Beyond Borders*, 93.

⁷⁵ Keck dan Sikkink, *Activist Beyond Borders*, 13.

⁷⁶ Keck and Sikkink, *Activists Beyond Borders*, 95.

pemicu untuk mendapatkan fungsi politik simbolik. Sedangkan *leverage politics* merupakan kemampuan untuk membuat aktor lain dalam menekan aktor target. Akuntabilitas politik berkaitan dengan obligasi aktor target sebagai negara terhadap penduduknya.

Jaringan advokasi transnasional bekerja secara bertahap. Pertama, pembuatan isu atau *agenda setting* sehingga isu tersebut naik ke permukaan dan mendapat perhatian.⁷⁷ Kedua, adanya pengaruh yang membuat negara memposisikan diri terhadap isu tersebut dalam forum regional maupun internasional.⁷⁸ Ketiga, pengaruh terhadap prosedur institusional.⁷⁹ Keempat, pengaruh yang dapat dilihat dari perubahan sikap atau kebijakan aktor ketiga.⁸⁰ Tahap-tahap tersebutlah yang kemudian dapat memengaruhi perubahan posisi negara dalam isu-isu tertentu.

1.4.3 Teori Modernisasi Ekologis

Diskursus kebijakan tahun 1970-an mengkritik ide bahwa masyarakat industrial dan kapitalis tidak melakukan pembangunan berkelanjutan⁸¹ dan para pembuat kebijakan pembangunan merah⁸² mengakui bahwa industrialisasi maupun kapitalisme tidak dapat dipertemukan dengan keberlangsungan dan kelestarian alam.⁸³ Teori modernisasi ekologis didasarkan pada perspektif bahwa adanya kebutuhan rekonsiliasi antara alam dan industrialisasi atau kapitalisme dan

⁷⁷ Keck and Sikkink, *Activists Beyond Borders*, 98.

⁷⁸ Keck and Sikkink, *Activists Beyond Borders*, 98.

⁷⁹ Keck and Sikkink, *Activists Beyond Borders*, 98.

⁸⁰ Keck and Sikkink, *Activists Beyond Borders*, 98.

⁸¹ Hajer 1995, 25-26 dalam Ingmar Lippert, *Is Ecological Modernization Theory Strong Enough for A Green Future for All*, (Lancaster University, 2007), 9.

⁸² Pepper 1984; Pepper 1996; Eblinghaus and Stickler 1996 dalam Lippert, *Is Ecological Modernization Theory Strong*, 9 istilah asli yang digunakan adalah *radical red-green environment*.

⁸³ Pepper 1984; Pepper 1996; Eblinghaus and Stickler 1996 dalam Lippert, *Is Ecological Modernization Theory Strong*, 9.

perubahan institusi yang menjadi lebih ekologis.⁸⁴ Teori modernisasi ekologis menyatakan bahwa pembangunan masuk ke dalam tahap pembangunan berkelanjutan melalui modernisasi ekologis.⁸⁵ Mol mengklaim bahwa perubahan dalam modernisasi ekologis harus dilakukan oleh semua aktor, yaitu korporasi, publik, dan otoritas negara beserta seluruh institusi yang meliputinya.⁸⁶ Perubahan tidak hanya terjadi pada sektor teknologi dan industri tetapi juga perubahan ide tentang “modernitas” yang menghasilkan masyarakat baru.⁸⁷ Sebagai sebuah teori yang lahir di kawasan Eropa, modernisasi ekologis tidak terbatas untuk tumbuh dan berproses di negara berkembang karena adanya katalisator berupa globalisasi.⁸⁸ Perubahan posisi negara dalam konteks pembangunan dari titik awal modernisasi ekologis lemah yang meliputi pembangunan yang mengedepankan segi ekonomis, perbaikan teknis, instrumental, orientasi nasional, dan dominasi negara menuju modernisasi ekologis kuat yang meliputi pembangunan yang bersifat ekologis, perbaikan institusional, komunikatif dan konsultatif, orientasi internasional, dan munculnya ruang baru bagi aktor nonnegara.⁸⁹

Teori modernisasi ekologis memandang masyarakat sipil sebagai sesuatu yang bertentangan dengan dunia tetapi tidak ingin menantang pasar ataupun negara melainkan mencoba mencari solusi dari permasalahan yang diciptakan

⁸⁴ Lippert, *Is Ecological Modernization Theory Strong*, 11.

⁸⁵ Gibbs 2000 dalam Lippert, *Is Ecological Modernization Theory Strong*, 11.

⁸⁶ Mol t.t. dalam Lippert, *Is Ecological Modernization Theory Strong*, 13. Lippert menggunakan istilah produsen dan konsumen di dalam tulisannya. Sementara itu, penulis menggunakan kata korporasi untuk menyebut produsen dan publik untuk menyebut konsumen. Tujuannya untuk memudahkan mengaitkan dengan pembangunan negara yang mencakup berbagai aspek, tidak hanya pasar saja, dan untuk menyeragamkan dan membuat konsistensi istilah-istilah yang digunakan di dalam penelitian. Kelompok yang berada dalam mazhab *weak ecological modernization* antara lain Hubber dan Jänicke pada tahap awal. Sedangkan Christoff merupakan salah satu pendukung mazhab *strong ecological modernization*. Lihat Lippert, *Is Ecological Modernization Theory Strong*, 13.

⁸⁷ Lippert, *Is Ecological Modernization Theory Strong*, 13.

⁸⁸ F.H. Buttel, “Ecological Modernization as Social Theory,” *Geoforum* 31, (2000): 59.

⁸⁹ Cristoff 1996, 490 dalam Adams, *Countercurrent in Sustainable Development*, 173.

oleh pasar dan negara.⁹⁰ Gramsci menyebutkan bahwa masyarakat sipil memiliki berbagai macam upaya untuk melakukan hal tersebut.⁹¹ Dalam kajian kontemporer, masyarakat politik berhasil membangun modernisasi ekologis sebagai hegemoni dengan menciptakan aktor kuat berupa masyarakat sipil sehingga berbuah pada konsensus.⁹² Konsensus diartikan sebagai bentuk kesepakatan di antara para aktor nonnegara tersebut untuk berada dalam satu suara atau keputusan terhadap isu-isu tertentu yang ditawarkan untuk menyelesaikan suatu masalah.

1.5 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dibuat peneliti, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut. Kompromi yang dilakukan Tiongkok terhadap hasil laporan WCD dalam pembangunan TGD disebabkan oleh keberhasilan strategi *boomerang pattern* masyarakat sipil global dalam memengaruhi perubahan posisi Tiongkok di pembangunan TGD melalui fungsi politik informasi, politik simbolik, *leverage politics*, dan politik akuntabilitas dari modernisasi ekologis lemah yang mengutamakan aspek ekonomi, perbaikan teknis, pembangunan instrumental, orientasi nasional, dan dominasi negara menuju ke modernisasi ekologis kuat yang dicirikan dengan pembangunan yang bersifat ekologis, perbaikan institusional, komunikatif dan konsultatif, orientasi internasional, dan munculnya ruang baru bagi aktor nonnegara.

⁹⁰ Lippert, *Is Ecological Modernization Theory Strong*, 20-1.

⁹¹ Gramsci 1988 dalam Lippert, *Is Ecological Modernization Theory Strong*, 21.

⁹² Keil and Desfor 2003, 28 dalam Lippert, *Is Ecological Modernization Theory Strong*, 21.

I.6 Metodologi Penelitian

I.6.1 Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Konsep

I.6.1.1 Strategi *Boomerang Pattern* Masyarakat Sipil Global

Menurut Carothers, MSG merupakan konsep yang lebih luas daripada NGOs, meliputi semua jenis organisasi dan asosiasi yang berdiri di luar negara dan pasar.⁹³ Menurut Gramsci, MSG berbeda dari sekedar basis ekonomi dan juga dibedakan dari negara yang dicirikan sebagai ranah tempat tatanan sosial yang ada dibangun dan kombinasi kekuatan yang memungkinkan adanya dukungan untuk tatanan baru.⁹⁴ Berdasarkan dua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dikategorikan sebagai MSG adalah aktor selain negara dan pasar dengan kekuatan tertentu dalam membentuk tatanan baru.

MSG memengaruhi negara untuk melaksanakan tujuannya melalui kerjasama dengan otoritas publik dan atau agen pasar, sedangkan yang lain melalui cara yang konfrontasional dan menolak semua *engagement* yang dibangun oleh kekuatan sentral.⁹⁵ Sebagai asosiasi voluntaris, MSG menjadi global karena dimotivasi oleh adanya rasa solidaritas antarwilayah.⁹⁶ MSG yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah seluruh gerakan antidam dari dalam Tiongkok baik yang terorganisir maupun secara individu dan aktor-aktor internasional seperti Green China, International Three Gorges (Overseas Chinese Ecological Society, Friends of the Earth, dan kelompok dari Kanada bernama Probe International), International Rivers Network, Berne Declaration, dan Human Rights Watch.

⁹³ Thomas Carothers, "Think Again: Civil Society," *Foreign Policy*, (2000): 19.

⁹⁴ Gramsci dalam Louise Amoore and Paul Langley, "Ambiguities of global civil society," *Review of International Studies* 30, no. 1 (2004): 93.

⁹⁵ Jan Aart Scholte, "Global Civil Society: Changing the World?" *CSGR Working Paper* 99, no. 31 (1999): 6.

⁹⁶ Waterman 1998 dalam Scholte, "Global Civil Society: Changing the World?" 12.

Diplomasi MSG merupakan upaya MSG untuk melakukan persuasi dengan berkomunikasi dengan agen pemerintah yang memiliki kekuasaan legal yang terlibat di dalam pembuatan keputusan untuk menerima perspektif MSG.⁹⁷ Pengaruh terlihat ketika terdapat aktor yang secara intensional berkomunikasi dengan aktor lain sehingga dapat mengubah perilaku aktor tersebut daripada sebelumnya.⁹⁸ Ada tidaknya pengaruh dilihat dari bagaimana posisi awal negara dan apakah negara mengubah posisinya.⁹⁹ Jika pertanyaan tersebut terjawab iya, maka analisis berlanjut pada bagaimana MSG memengaruhi perilaku negara. Keberadaan informasi di dalam jaringan merupakan kekuatan bagi MSG untuk menyebarkan pengaruh.¹⁰⁰

1.6.1.1.1 Politik Informasi

Informasi mengaitkan anggota jaringan melalui pertukaran informasi informal seperti panggilan telepon, surel, komunikasi faksimil, surat, pamflet, dan buletin.¹⁰¹ Aktor nonnegara memberikan pengaruh melalui pemberian informasi alternatif yang tidak hanya menyajikan data-data dari fakta lapangan tetapi juga testimoni-testimoni dari pihak-pihak yang merasakan dampak.¹⁰² Informasi-informasi tersebut bukan untuk menjustifikasi apakah sesuatu terjadi dengan benar atau salah melainkan bertujuan untuk memengaruhi aktor lain dan menstimulasinya untuk melakukan aksi. Aktor transnasional mengidentifikasi testimoni yang mungkin berharga dengan bekerjasama dengan NGOs untuk

⁹⁷ Michelle M. Betsill and Elisabeth Corel, ed. *NGO Diplomacy: The Influence of Nongovernmental Organizations in International Environmental Negotiations* (London: The MIT Press, 2008), 24.

⁹⁸ Betsill and Corel, *NGO Diplomacy*, 24.

⁹⁹ Betsill and Corel, *NGO Diplomacy*, 34.

¹⁰⁰ Betsill and Corel, *NGO Diplomacy*, 24.

¹⁰¹ Keck and Sikkink, *Activists Beyond Borders*, 95.

¹⁰² Keck and Sikkink, *Activists Beyond Borders*, 95.

mencari orang-orang yang dapat menceritakan testimoni mereka.¹⁰³ NGOs mungkin saja mencarinya melalui para ekspatriat, pelajar yang sedang melakukan perjalanan, atau meninjau dari media. Teknologi membantu jalannya informasi melalui internet yang tidak pernah terjadi ketika komputer belum ditemukan. Pemerintah tidak sepenuhnya memiliki kontrol penuh terhadap pertukaran informasi.¹⁰⁴ NGOs maupun aktor individu sebagai MSG bergantung pada akses informasi untuk membantu mereka menjadi aktor yang terlegitimasi.¹⁰⁵ Kontak NGOs dengan aktor domestik dapat memperluas legitimasi mereka. Ketika NGOs tidak memiliki basis di negara tujuan maka secara insidental akan dikirim staf untuk melakukan investigasi untuk menjalankan misi penggalian informasi.¹⁰⁶ Media menjadi *partner* esensial dalam membangun jaringan dan menarik perhatian.¹⁰⁷

I.6.1.1.2 Politik Simbolik

Aktivis menaikkan isu ke permukaan dengan mengidentifikasi dan menyediakan penjelasan yang meyakinkan dalam even simbolik yang dapat menjadi katalis dalam pertumbuhan jaringan.¹⁰⁸ Berkat adanya even simbolik ini, pengaruh diberikan melalui meningkatnya kesadaran mengenai isu yang diusung dan memperluas jumlah pendukung.¹⁰⁹

¹⁰³ Keck and Sikkink, *Activists Beyond Borders*, 96.

¹⁰⁴ Keck and Sikkink, *Activists Beyond Borders*, 96.

¹⁰⁵ Keck and Sikkink, *Activists Beyond Borders*, 96.

¹⁰⁶ Keck and Sikkink, *Activists Beyond Borders*, 96.

¹⁰⁷ Keck and Sikkink, *Activists Beyond Borders*, 96.

¹⁰⁸ Keck and Sikkink, *Activists Beyond Borders*, 96.

¹⁰⁹ Keck and Sikkink, *Activists Beyond Borders*, 96.

I.6.1.1.3 Leverage Politics

Leverage politics merupakan gambaran yang menunjukkan kemampuan aktor yang lebih lemah untuk memengaruhi aktor yang lebih kuat supaya dapat mengubah kebijakan yang telah dibuat.¹¹⁰ Terdapat dua jenis *leverage politics*, yakni *material leverage* yang didapat melalui dana finansial atau voting dalam organisasi internasional, *prestigious offices*, atau yang lain serta *moral leverage* yang disebut sebagai *mobilisation of shame*.¹¹¹ *Moral leverage* ditinjau dengan melihat apakah aktor target menjadi sorotan di dunia internasional terkait dengan nilai-nilai dan norma yang dianut secara global.

I.6.1.1.4 Politik Akuntabilitas

Politik akuntabilitas merupakan usaha aktor untuk menahan aktor yang kuat atas pernyataan yang sebelumnya disampaikan terkait kebijakan atau prinsip tertentu.¹¹² Politik akuntabilitas tidak hanya mengacu pada pernyataan tetapi juga mengenai komitmen negara untuk menyediakan kebutuhan bagi warga negaranya. Hal tersebut terjadi karena selalu terdapat kemungkinan dalam politik akuntabilitas bahwa pemerintah tidak dapat memenuhi apa yang dijanjikan dengan praktek di lapangan.¹¹³ Secara sederhana, apa yang disampaikan pemerintah tidak sama dengan kenyataan atau ketika negara tidak mampu menjalankan fungsinya dengan optimal.

¹¹⁰ Keck and Sikkink, *Activists Beyond Borders*, 97.

¹¹¹ Keck and Sikkink, *Activists Beyond Borders*, 97.

¹¹² Keck and Sikkink, *Activists Beyond Borders*, 97.

¹¹³ Keck and Sikkink, *Activists Beyond Borders*, 97-8.

I.6.1.2 Tingkat Modernisasi Ekologis Lemah dan Kuat

Perubahan posisi negara ditunjukkan melalui adanya perubahan dalam strategi pembangunan sebuah negara yang dilihat melalui indikator-indikator berikut. Pertama, orientasi pembangunan yang semula hanya melihat dalam skala nasional beralih ke kacamata yang lebih besar, yaitu internasional.¹¹⁴ Hal tersebut dapat dilihat dari keterlibatan negara dalam rezim-rezim internasional maupun bentuk kerjasama lain. Dengan bergabung ke dalam komunitas internasional negara melakukan pembelajaran terhadap nilai-nilai global.

Kedua, pembangunan diterjemahkan sebagai sesuatu yang instrumental menuju ke sesuatu yang komunikatif dan konsultatif.¹¹⁵ Pembangunan dilakukan oleh para teknokrat atau neo-korporat yang bersifat sepihak dan tertutup menuju ke pembangunan yang bersifat terbuka atau demokratis.¹¹⁶ Hubungan antara negara dengan masyarakat sipil pada *strong* SD adalah berupa partisipasi demokratis yang membuka dialog yang mencerminkan adanya pilihan-pilihan alternatif di waktu-waktu mendatang.¹¹⁷ Sedangkan *weak* SD dilakukan berdasarkan insiasasi dari atas ke bawah, dialog antara negara dengan masyarakat sipil terbatas sehingga partisipasi elit lebih diutamakan.¹¹⁸

Ketiga, keberadaan negara bersifat uniter yang menghegemoni aktor-aktor lain menuju ke adanya diversifikasi peran atau munculnya ruang baru bagi aktor nonnegara.¹¹⁹ Memasuki dekade 1990-an, para *scholar* melihat realita bahwa modernisasi ekologis tidak hanya terjadi melalui perkembangan industrialisasi

¹¹⁴ Cristoff 1996, 490 dalam Adams, *Green Development*, 173.

¹¹⁵ Cristoff 1996, 490 dalam Adams, *Green Development*, 173.

¹¹⁶ Cristoff 1996, 490 dalam Adams, *Green Development*, 173.

¹¹⁷ Zeynep Sezgin, "Ecological Modernization: A Viable Option for A Sustainable Future?" *Marmara Journal of European Studies* 20, no. 1 (2012): 226.

¹¹⁸ Sezgin, "Ecological Modernization," 226.

¹¹⁹ Cristoff 1996, 490 dalam Adams, *Green Development*, 173.

tetapi juga adanya otoritas dari negara dan NGOs.¹²⁰ Modernisasi ekologis berjalan bersama dengan modernisasi politik, yakni partisipasi publik termasuk di dalamnya protes yang berasal dari *grassroots* dan juga *environmental lobbying*.¹²¹

Keempat, pembangunan yang bersifat ekonomis menuju ekologis.¹²² Menurut Sezgin, modernisasi ekologis juga merupakan strategi kebijakan.¹²³ Konsentrasi modernisasi ekologis terdapat pada transformasi sistem ekonomi bersama masalah ekologi sebagai perwakilan utama dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan korporasi.¹²⁴ Modernisasi ekologi yang kuat tidak hanya menekankan hubungan *win-win solution* antara perlindungan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menganjurkan untuk melakukan intensifikasi perlindungan lingkungan dalam menunjang pembangunan ekonomi lebih lanjut.¹²⁵ Dengan kata lain bahwa otoritas di suatu wilayah dengan aktor lain saling bersinergi untuk terus mengembangkan pelestarian lingkungan dan juga pembangunan ekonomi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Kelima, pembangunan semula dilakukan untuk memperbaiki hal-hal bersifat teknis, yakni adanya penemuan-penemuan ilmiah yang mendukung perbaikan proses produksi beralih ke perbaikan institusional atau sistemik.¹²⁶ Huber mengklaim bahwa modernisasi terjadi dan membutuhkan penemuan teknologi yang ekologis berbasis proses, produk, dan manajemen teknologi.¹²⁷ Dia juga mengungkapkan bahwa di dalam modernisasi ekologis inovasi teknis

¹²⁰ Lippert, *Is Ecological Modernization Theory Strong*, 16.

¹²¹ Fisher and Freudenburg 2001 dalam Lippert, *Is Ecological Modernization Theory Strong*, 17.

¹²² Cristoff 1996, 490 dalam Adams, *Green Development*, 173.

¹²³ Sezgin, "Ecological Modernization," 222.

¹²⁴ Sezgin, "Ecological Modernization," 222.

¹²⁵ Sezgin, "Ecological Modernization," 222.

¹²⁶ Cristoff 1996, 490 dalam Adams, *Green Development*, 173.

¹²⁷ Huber 1993 mengacu pada Birke dan Schwarz 1994, 150-1 dalam Lippert, *Is Ecological Modernization Theory Strong*, 13.

maupun institusional terletak di dalam pembaruan keorganisasian dan kompetitor yang tidak melakukan inovasi yang akan kalah bersaing.¹²⁸ Kaum yang mendukung modernisasi ekologis lemah berargumen bahwa mengembangkan teknologi hijau akan meningkatkan efisiensi dan menuntun pada penurunan penggunaan bahan baku. Namun, inovasi tersebut cenderung abai pada hal-hal yang bersifat politik dan proses sosial yang terjadi di masyarakat.¹²⁹

Tabel I.2 Tingkat Modernisasi Ekologis Lemah dan Kuat

Pembeda	Lemah	Kuat
Orientasi pembangunan	Nasional	Internasional
Tipe pembangunan	Instrumental	Komunikatif dan konsultatif
Posisi aktor nonnegara	Dominan pemerintah	Tersedia ruang untuk diversifikasi peran
Sifat pembangunan	Ekonomis	Ekologis
Tujuan pembangunan	Perbaikan teknis	Perbaikan institusional atau sistemik

I.6.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif, yakni menyajikan pembahasan secara sistematis, analitis, dan mengandung logika berpikir yang saling terkait antar berbagai proposisi dengan contoh kasus yang diangkat.¹³⁰

I.6.3 Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini berawal tahun 1989 ketika *draft* awal proyek TGD yang diajukan kepada pemerintah menuai protes dari publik Tiongkok di

¹²⁸ Lippert, *Is Ecological Modernization Theory Strong*, 15.

¹²⁹ Lippert, *Is Ecological Modernization Theory Strong*, 16.

¹³⁰ Ulber Silalahi, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Unpar Press, 2006).

Peristiwa Tianamen. Batas akhir penelitian dipilih hingga tahun 2002 ketika masa kerja WCD berakhir dan penggunaan data-data pendukung terbaru dari berbagai institusi, laporan formal maupun berita.

I.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur atau tinjauan pustaka. Studi literatur merupakan proses eksplorasi dengan evaluasi terhadap definisi, kata kunci, dan terminologi diperlukan sebagai penunjang pemahaman terhadap problematika penelitian.¹³¹ Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari milis resmi institusi di antaranya situs resmi, media sosial, dan publikasi *online* langsung dari sumber yang bersangkutan.¹³² Sedangkan data sekunder merupakan bahan-bahan rujukan seperti kutipan komentar, artikel, skripsi, tesis, disertasi, dan data-data interpretatif yang berkaitan dengan penelitian.¹³³

I.6.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data kualitatif dengan melakukan pengolahan informasi ke dalam bentuk kalimat dengan memperhatikan proses, peristiwa, dan otentisitas. Teknik analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹³⁴ Analisis data berupa angka digunakan untuk mendukung pernyataan dan argumentasi yang dimunculkan dalam penelitian.

¹³¹ Laura Roselle dan Sharon Spray, *Scholarly Literature and The Literature Review* dalam *Research and Writing in International Relations* (New York: Pearson Longman), 17-34.

¹³² Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, 265.

¹³³ Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, 266.

¹³⁴ Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, 311.

I.6.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian tersusun secara sistematis ke dalam lima bab yang menjelaskan pengaruh aktor-aktor politik lingkungan internasional dalam memengaruhi posisi Tiongkok.

Bab I berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, dan metodologi penelitian.

Bab II upaya MSG sebagai gerakan antitam dalam memengaruhi posisi Tiongkok dalam pembangunan TGD melalui jaringan advokasi transnasional.

Bab III merupakan penjabaran mengenai perubahan posisi Tiongkok dalam pembangunan TGD.

Bab IV merupakan korelasi antara upaya-upaya MSG dalam jaringan advokasi transnasional terhadap perubahan posisi Tiongkok selama proses pembangunan TGD.

Bab V merupakan kesimpulan menyeluruh mengenai alasan yang menyebabkan Tiongkok melakukan kompromi hasil laporan WCD tahun 2000 dalam pembangunan TGD.